

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada Bab IV tersebut di atas, maka kesimpulan yang diambil yaitu

- a) pendamping harus melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) untuk memferivikasi kehadiran baik pendidikan maupun kesehatan.
- b) Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sangat puas dengan bantuan PKH yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) cukup baik dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di bidang pendidikan maupun kesehatan.
- c) Ketepatan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah tepat pada sasaran karena masih ditemukan di lapangan masyarakat mampu mendapatkan bantuan PKH, sedangkan masyarakat yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan.

4.5 Saran

Adapun Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pendamping PKH Desa Tunmat harus menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat miskin atau keluarga tidak mampu (pendidikan, kesehatan dan

kesejahteraan sosial) sehingga banyak masyarakat yang mengetahui adanya program PKH dari pemerintah.

- 2) Program Keluarga Harapan di Desa Tunmat untuk kedepannya lebih memfokuskan pada proses penyadaran pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) agar tidak ada ketergantungan terhadap bantuan-bantuan lainnya.
- 3) Proses pelaksanaan pemuktahiran data harus di tingkatkan lagi dan perlu dilakukan untuk memastikan memastikan agar nominal besaran dana bantuan diterima oleh mereka yang layak menerima bantuan program harapan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta:PT.Rineka Cipta.
- Aan Komariah dan Djam'an Satori.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:Alfabeta.
- Syukri, Agus Fanar. 2009. *Standar Pelayanan Publik Pemda*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Cahyat, A. 2004. *Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia*. Poverty & Decentralization Project CIFOR (Center for International Forestry Research) -BMZ (Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). November 2004:2.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Susanto. (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media Group
- Budi Winarno. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Budiadnyana, I Nyoman & Gede Sandiasa, 2017. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, KabupatenBuleleng*. *Dalam Locus Majalah Ilmiah Fisip*. Vol 8 No Agustus

2017.http://www.fisipunipas.com/asset/user_file/20171125111928_nyoman%20budiadnyanan20gede%20sandiasa%20majalah%20ilmiah%20locus%20agustus%202017-2018.pdf.

Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier. 1979. Dalam Buku Solihin Abdul Wahab (2008:65).

Damian, Eddy. 2002. "*Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*", Alumni, Bandung.

Djaali, Pudji muljono. 2007. *pengukuran dalam bidang pendidikan, Program Pascasarjana UNJ:Jakarta*

Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, 2008, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan pendidikan*

Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Emma Vito Susilo, Djoko Suyono, tahun 2017, judul penelitian "*Evaluasi Pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kertasinduyasa Kecamatan Jatibaraang Kabupaten Brebes* : Jurnal Administrasi Publik (JAP).

Fredrickson dan Hart. 2003, *Kebijakan Publik dan Formulasi* Jakarta: Sinar Harapan

Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.

Hayat, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Hidayat, S. (2018). Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis 2018. IIB Darmajaya, Bandar Lampung, Hal 194 -202

Kementerian Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta:

Direktorat Jaminan Sosial, 2019.

Kartasasmita, G.1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan*

Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES

Lestari, Sri Rahayu. 2012. *Bantuan Sosial di Indonesia (Sekarang dan ke Depan)*.

Bandung: Fokus Media. Lejiu, Agustinus, dkk. 2014. *Evaluasi Kebijakan*

Pembangunan Transmigrasi. Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada

Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu). *Jurnal Administrative*

Reform, Vol. 2, No. 4. Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan*

Kesenjangan. Yogyakarta: Aditya Media.

Nunung Nurwati. 2008. “*Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan*

Alternatif Kebijakan”. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 1,

Januari 2022

Purwanto, Edy. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Fakultas Ilmu

Pendidikan Universitas Negeri Semarang.

Panduan Umum PKH oleh Kementrian Sosial RI Tahun 2013 dan Tahun 2016 dan

2018.

Sarifudin, Hakim. tahun 2018 “*Evaluasi Pelaksanaan Proram Keluarga Harapan*

(PKH) di desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Skripsi Ejournal Ps fisip-umul.

Andrasilli, Johan, Ratna Saraswati, M. (2018). *Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Gizi Terhadap Terjadinya Obesitas Pada Anak SMA Di Denpasar*, 7.

Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.

Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susnaini. (2013). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2013 Di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang*. Jember: K. B. K. P. K.Hlm 74-75.

Setiani, Tri. 2014. *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat.

Wibawa, S.(1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 *tentang Program Keluarga Harapan*.

Peraturan Presiden *Republik Indonesia* Nomor 15 tahun 2010 *tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.

Undang-undang. Nomor 11 tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial Pada pasallayat 9*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016

Keputusan Bupati Magelang No. 180.182/84/KEP/2018

